

BAB II

DINAMIKA POLITIK ARGENTINA DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMF

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Argentina dari masa transisi menuju demokrasi, yang ditandai dengan terpilihnya Raul Ricardo Alfonsín Foulkes hingga akhir masa jabatan Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai politik luar negeri Argentina pada setiap presiden yang sedang memimpin Argentina. Hubungan luar negeri Argentina tersebut lebih dikhususkan kepada hubungannya dengan lembaga keuangan dunia, yaitu IMF. Dalam penjelasan yang disampaikan penulis, tidak semua presiden yang sedang menjabat dijabarkan secara detail mengenai dinamika yang terjadi saat itu, dikarenakan adanya jabatan presiden yang hanya dalam waktu singkat saja, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap presiden sebelumnya.

Memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan sumber daya alamnya yang melimpah, Argentina tidak selamanya hidup dalam kemakmuran. Gejolak dalam negeri sering terjadi di negara tersebut. Masa kolonialisasi oleh bangsa Spanyol pernah dialami oleh bangsa Argentina hingga akhirnya merdeka pada tahun 1816. Dalam perpolitikan Argentina pernah mengalami beberapa kali pemerintahan diktator oleh militer yang terkadang diselingi oleh pemerintahan

sipil. Masalah ekonomi juga kerap terjadi di Argentina yang menyebabkan gejolak dalam negeri sehingga menyebabkan keterpurukan Argentina.

A. Era Raul Ricardo Alfonsin Foulkes (1983-1989)

Pemerintahan oleh junta militer dan rezim sipil yang silih berganti memimpin Argentina merupakan dinamika politik yang selalu terjadi pasca kemerdekaan dari bangsa Spanyol. Pada tahun 1982, saat Argentina dipimpin rezim militer, terjadi perang dengan Inggris yang dinamakan *Falkland War* atau biasa juga disebut dengan Perang Malvinas, yakni perang memperebutkan Pulau Malvinas. Kekalahan Argentina saat itu juga menjadi akhir dari rezim militer yang dipimpin oleh Leopoldo Galtieri.¹⁸

Setelah berakhirnya rezim militer, Argentina kembali dipimpin oleh rezim sipil. Pada tahun 1983 dilakukan pemilihan yang demokratis dan dimenangkan oleh Raul Ricardo Alfonsin Foulkes yang merupakan pemimpin dari partai UCR(*Union Civic Radical*). UCR merupakan partai yang berideologi *center-left* yang menentang pemerintah konservatif dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang bebas.¹⁹

Era kepemimpinan Foulkes, Argentina sedang dalam kondisi yang terpuruk. Kekalahan perang dengan Inggris menyebabkan kondisi ekonomi dan politik dalam negeri tidak stabil. Foulkes datang dengan visinya untuk

¹⁸ Komandoko, G. (2010). *Ensiklopedia Pelajar dan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. hlm. 246

¹⁹ Encyclopedia Britannica. *Radical Civic Union (UCR)* : *Encyclopedia Britannica*. Dipetik April 14, 2017, dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Radical-Civic-Union>

mempertahankan kestabilan dalam negeri dan mencegah terjadinya kudeta militer yang sering terjadi di masa sebelumnya. Terpilihnya Foulkes seperti munculnya harapan baru untuk rakyat Argentina, sehingga Foulkes harus menghadapi berbagai tuntutan rakyat. Setelah terpilihnya Foulkes, tidak berarti Argentina langsung berada dalam kondisi yang baik. Foulkes mewarisi negara dalam keadaan yang buruk, politik yang tidak stabil dan tingkat inflasi yang tinggi. Tercatat pada waktu itu Argentina memiliki hutang negara sebesar 40 miliar USD.²⁰

Menghadapi situasi dalam negeri yang sedang mengalami masa transisi dan dalam keadaan yang hancur, Foulkes mencoba memperbaiki keadaan tersebut dengan beberapa kebijakan. Setelah sebelumnya Argentina dipimpin oleh rezim militer yang korup dan banyak melanggar Hak Asasi Manusia, Foulkes mengadili para jendral dan perwira yang terlibat dalam pembunuhan lawan-lawan politiknya pada masa junta militer, hal ini merupakan salah satu jawaban dari tuntutan rakyat. Meski pada akhir masa jabatannya, Foulkes membebaskan para terdakwa yang terlibat dalam “perang kotor” tersebut untuk memperbaiki hubungannya dengan militer. Kontrol militer atas sipil juga menjadi kebijakan di era kepemimpinannya. Selain itu, Foulkes juga memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Inggris yang sebelumnya terlibat perang. Dalam hal ekonomi, saat itu Argentina sedang mengalami inflasi dengan laju kurang lebih

²⁰ Telegraph. (2009, April 1). *Raúl Alfonsín :Raúl Alfonsín* . Dipetik April 2, 2017, dari Raúl Alfonsín : <http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/politics-obituaries/5090540/Raul-Alfonsin.html>

400% dan Foulkes menerapkan kebijakan *price-freeze*, yakni larangan sementara kenaikan harga untuk produk ataupun layanan.²¹

Dengan kondisi ekonomi dalam negeri tersebut, Foulkes masih mempertahankan posisi IMF (*International Monetary Fund*). Argentina dan IMF memiliki sejarah hubungan yang panjang dan menyusahkan. Menteri keuangan Argentina tahun 2002, Lavagna mengungkapkan bahwa Argentina dan IMF sebenarnya telah membuat beberapa perjanjian/kerjasama sejak tahun 1956, meskipun perjanjian yang ditandatangani tidak seluruhnya terpenuhi oleh kedua belah pihak.²² Saat mengalami krisis pada tahun 1983, IMF memberikan bantuan kepada Argentina untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang hancur yang salah satunya diakibatkan kekalahan dalam *Falkland War*. Dengan bantuan yang diberikan oleh IMF, tentunya diharapkan dapat segera memulihkan perekonomian dalam negeri, namun harapan IMF kepada Argentina tidak terpenuhi, pada era Raul Ricardo Alfonsin Foulkes nyatanya tidak memberikan peningkatan ekonomi yang signifikan. Tercatat beberapa poin antara lain; 1. Argentina terus menerus menanggung beban yang disebabkan oleh *capital exports* sebesar 23,4 miliar USD, serta hutang luar negeri yang tumbuh sebanyak 14,1 miliar USD. GDP per kapita yang turun sejauh 4% selama era Foulkes (1983-1988). Pendapatan manufaktur yang turun sebesar 9% dan pada mesin serta peralatan sub-sektor

²¹ Loc.Cit

²²James Ferrer, J. &. (2002, Desember 5). *Argentina and the IMF:An Adversarial Relationship* : *CLAI Commentary*. Dipetik April 2, 2017, dari CLAI Commentary :<https://www2.gwu.edu/~clai/commentaries/argentina.htm>

sebesar 11%. GDP dan GNP serta jumlah pekerja yang bekerja di industri manufaktur stagnan seperti pada awal 1983.²³

Era Raul Ricardo Alfonsin Foulkes memang memberikan perubahan yang sangat tajam khususnya dalam sektor pemerintahan, dimana pada masa itu kediktatoran rezim militer berhasil digantikan dengan pemerintahan yang demokratis, setidaknya hal tersebut membuat situasi dalam negeri lebih aman. Foulkes juga berpihak kepada rakyat menengah ke bawah selama kepemimpinannya. Mewarisi kondisi negara dengan ekonomi yang hancur, Foulkes belum juga bisa memperbaiki keadaan ekonomi Argentina dan cenderung stagnan hingga akhir masa pemerintahannya yang berakhir enam bulan lebih cepat.

B. Era Carlos Menem (1989-1999)

Setelah berakhirnya rezim Raul Ricardo Alfonsin Foulkes, Argentina kembali dipimpin oleh rezim sipil, yaitu Carlos Saul Menem atau biasa disebut Carlos Menem. Menem merupakan politikus dan pengacara dari Partai Justicialist, Ia juga menjadi Presiden Argentina dari golongan peronis pertama yang terpilih setelah Juan Peron pada tahun 1973. Peronisme sendiri merupakan doktrin politik yang berjuang untuk keadilan sosial dan tumbuh menjadi gerakan rakyat dan

²³ Rush, D. S. (1989, Juni 27). The Alfonsin Era : IMF Policies Wrecked Argentina's Economy. *Executive Intelligence Review* , hlm. 26

menjadi ideologi pembebasan, ideologi tersebut digagas oleh Juan Domingo Peron.²⁴

Pada awal masa jabatannya, Carlos Menem sadar betul bahwa pada pemerintahan sebelumnya sempat terjadi gejolak politik antara sipil dan militer. Dalam menjalankan langkah-langkah transisi kekuasaan, Menem memperbaiki hubungan dengan militer, meskipun di akhir masa jabatan Foulkes, usaha tersebut sudah dilakukan. Hubungan dengan militer dibangun kembali dengan baik oleh Menem, sehingga dalam masa pemerintahannya, Menem cukup mendapatkan dukungan dari militer. Hal tersebut menjadi kekuatan Carlos Menem dalam menjaga stabilitas dalam negeri, sehingga mencegah terjadinya kudeta militer.

Akhir pemerintahan sebelumnya, Alfonsin Foulkes yang tidak mampu memperbaiki keadaan ekonomi Argentina menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh Carlos Menem. Tingkat inflasi yang sangat tinggi menyebabkan nilai mata uang peso jatuh dan juga meningkatkann gesekan sosial, yang kemudian diikuti oleh keadaan pemerintah yang tidak mampu membayar hutang luar negerinya. Seperti pemerintahan sebelumnya, Carlos Menem merupakan Presiden yang cukup kooperatif dengan IMF, meskipun cara menghadapainya berbeda dengan Foulkes. Raul Alfonsin Foulkes pada masa pemerintahannya cukup tegas dan berani mengimplementasikan strategi konfrontasi dalam bernegosiasi dengan IMF. Salah satunya adalah mengusulkan moratorium hutang,

²⁴ Aly, B. (2017, Januari 24). *Argentina Dibayangi Peronisme : Uni Sosial Demokrat*. Dipetik April 3, 2017, dari Uni Sosial Demokrat:
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9123&coid=3&caid=31&gid=2

yaitu otoritas legal untuk penundaan pembayaran hutang. Hal tersebut dilakukan Foulkes untuk menjaga citra Argentina di mata publik, karena pada masa itu masyarakat mulai menentang keberadaan IMF.²⁵

Bantuan yang diberikan IMF pada pemerintahan Raul Alfonsin belum juga memperbaiki kondisi ekonomi Argentina, bahkan kondisi ekonomi cenderung mengalami stagnasi. Tuntutan yang besar kembali muncul pada pemerintahan Carlos Menem, banyak harapan dari masyarakat terhadap Menem. Meski banyak tuntutan kepada Menem pada saat itu tidak menyebabkan kekacauan dalam negeri. Pengaruh peronisme di Argentina masih cukup kuat, sehingga dukungan untuk Menem masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 1990an, Argentina juga cukup mendapat dukungan dari lembaga keuangan dunia, salah satunya adalah IMF dalam memperbaiki stabilitas ekonomi negara.

Hubungan Argentina dengan IMF di bawah Presiden Carlos Menem masih berjalan dengan baik, meskipun pada kepemimpinan Menem, Argentina tidak memiliki posisi tawar yang baik dengan IMF. Dengan kekacauan ekonomi yang dialami Argentina, IMF dan Bank Dunia sepakat membantu negara tersebut untuk membayar hutang luar negerinya. Seperti halnya dengan negara lain, bantuan IMF tidak serta merta diberikan kepada Argentina. *No Free Lunch* adalah kata yang tidak asing untuk menggambarkan kondisi tersebut. Beberapa syarat dan rekomendasi pun harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memperlancar bantuan

²⁵ Ayu, D. (2012). *Politik Privatisasi Air di Argentina (1990-1999) Sebagai Upaya Restrukturasi Ekonomi Nasional di Bawah Rezim Washington Consensus*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, hlm. 33

yang akan diberikan. Salah satu rekomendasi dari IMF dan Bank Dunia yaitu, restrukturisasi ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah Argentina. Privatisasi BUMN adalah salah satu strategi yang harus dilakukan oleh Menem untuk memperbaiki keadaan ekonomi Argentina.²⁶

Untuk mendapatkan bantuan dari IMF, maka pada tahun 1991 Argentina harus mengikuti saran yang diberikan oleh IMF yang dianggap dapat mengembalikan keadaan ekonomi yang sedang terpuruk. Argentina melakukan penyesuaian struktural ala IMF dan harus mengikuti resep-resep Konsensus Washington. Konsensus Washington sendiri adalah resep-resep yang disusun dan disepakati oleh lembaga-lembaga keuangan dunia yang terletak di Washington. Ekonom terkemuka Williamson pernah menyebutkan bahwa reformasi ekonomi ini diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pengetatan fiskal
2. Pengurangan jatah anggaran pemerintah untuk sektor publik
3. Reformasi pajak
4. Liberalisasi tingkat suku bunga
5. Implementasi kurs mata uang yang kompetitif
6. Liberalisasi perdagangan
7. Liberalisasi investasi asing
8. Privatisasi
9. Deregulasi

²⁶ Ibid., hlm. 34

10. Jaminan kepemilikan publik.²⁷

IMF mengklaim bahwa dengan menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut, ekonomi Argentina dapat segera pulih.

Pada september 1994, Argentina melakukan privatisasi/swastanisasi secara besar-besaran. Hampir seluruh BUMN diprivatisasi, termasuk BUMN percetakan uang, kantor pos, dan bahkan bandar udara. Dalam jangka pendek langkah yang dilakukan pemerintah Argentina tersebut memang membuahkan hasil, Menem berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Argentina. Terbukti pada tahun 1994 inflasi turun drastis menjadi 4% dan pada 1996-1997 menjadi 0%.²⁸ Di akhir pemerintahannya, Argentina kembali terjangkit virus korupsi yang sebelumnya sudah diatasi oleh Menem di periode pertama kepemimpinannya. Selain itu pengangguran juga semakin meningkat dan yang lebih memperburuk keadaan adalah BUMN sudah dimiliki swasta, sehingga menyebabkan pemerintah tidak bisa memegang penuh kendali pada sektor-sektor yang krusial. Kondisi tersebut kembali menempatkan Argentina pada krisis ekonomi.

C. Era Fernando de la Rúa (1999-2001)

Seperti pemerintahan sebelumnya, Argentina mengalami masa transisi kepemimpinan dengan keadaan ekonomi yang hancur. Gesekan yang terjadi di masyarakat selalu terjadi, hal ini disebabkan oleh banyaknya benturan-benturan kepentingan yang terjadi di dalam negeri. Seperti halnya yang terjadi pada akhir

²⁷ Ibid., hlm. 30

²⁸ Joseph, S. &. (2017). *Making Globalization Works : Menyasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 19

masa kepemimpinan Raul Alfonsin, besarnya tuntutan masyarakat dan ditambah lagi bergesernya dukungan militer kepada Carlos Menem, memaksa Foulkes mengundurkan diri dari jabatannya enam bulan lebih cepat.

Tidak seperti pendahulunya, Fernando de la Rúa bukan merupakan kalangan peronis yang pada saat itu masih menjadi partai yang menguasai buruh dan sebagian besar provinsi. Meski bukan dari golongan peronis, koalisi *center-left* yang dilakukan de la Rúa terbukti dapat memenangkan dirinya sebagai Presiden Argentina. Pemerintahan yang sangat singkat (1999-2001) memperlihatkan bahwa pemerintahan Argentina setelah Menem tidak terlalu kuat.

Ekonomi Argentina di masa pemerintahan de la Rúa sangat kacau, beberapa masalah justru bertambah pada periode ini. Setelah sebelumnya Argentina terjangkit virus korupsi, BUMN yang sudah diprivatisasi, serta meningkatnya pengangguran, kini Argentina tidak mampu mempertahankan nilai mata uang Argentina terhadap mata uang asing. Akibatnya kondisi fiskal memburuk dan menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Bahkan pada tanggal 30 November 2001 bank-bank mengalami penarikan dana besar-besaran (*rush*) hingga 700 juta USD karena kepanikan masyarakat terhadap isu bank sentral akan membekukan rekening para deposan.²⁹

Menghadapi *chaos* yang terjadi dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengejutkan. Pada umumnya untuk mengatasi kepanikan

²⁹ Ashari, A. (2002, Juli 29). *Krisis Argentina dan Refleksi Masalah BLBI : Uni Sosial Demokrat*. Dipetik April 3, 2017, dari Uni Sosial Demokrat: http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=309&coid=2&caid=30

nasabah, pemerintah seharusnya melakukan proteksi pada simpanan nasabah untuk menjaga kepercayaan nasabah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru menerapkan *corralito*, yakni pemberlakuan jumlah *limit* yang dapat ditarik oleh nasabah. Pada 1 Desember 2001, Bank Sentral menetapkan batas maksimum penarikan dana tunai oleh masyarakat sebesar 250 USD per minggu dan membatasi transfer dana ke luar negeri hingga 1.000 USD. Untuk bertransaksi melebihi *caping*, publik dapat menggunakan alat pembayaran lain berupa cek, kartu kredit, kartu debit, atau transfer.³⁰

Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan de la Rúa nyatanya tidak dapat membendung gejolak yang terjadi, meskipun Presiden Argentina waktu itu, Fernando De la Rúa berjanji mempertahankan *peg* (penyamaan nilai uang) peso terhadap dollar AS sebesar 1:1, namun hal tersebut tidak terlalu mendapat perhatian dari publik melihat kondisi yang sedang terjadi sudah sangat parah. Seperti halnya Negara Dunia Ketiga lainnya, dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang terjadi di negara tersebut, Argentina mengambil langkah instan dengan meminta lagi kucuran dana kepada IMF. IMF sepakat memberi bantuan dana untuk memperbaiki krisis ekonomi yang terjadi, tentunya dengan negosiasi yang sulit dan dengan bermacam-macam persyaratan.

Fernando de la Rúa yang tidak mampu mengatasi banyaknya tuntutan masyarakat yang melakukan demonstrasi besar-besaran akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 20 Desember 2001. Saat pengunduran diri tersebut terjadi *chaos* demonstran yang berujung tewasnya 28 orang dan lebih dari 200 orang

³⁰ Loc.Cit

mengalami luka, serta terjadinya penjarahan toko oleh massa. Pengunduran diri Fernando de la Rúa mencatatkan angka pengangguran yang meningkat hingga 18,3% dengan 40% dari 36 juta penduduk.³¹ Setelah pengunduran diri, kursi kepemimpinan Argentina diambil alih oleh ketua senat, yaitu Ramon Puerta. Jabatan yang diambil oleh Ramon Puerta hanya bertahan selama 48 jam saja. Argentina segera menemukan pengganti Puerta, yaitu Adolfo Rodríguez Saa.

D. Era Adolfo Rodríguez Saa (2001-2002)

Rodríguez Saa menggantikan Ramon Puerta sebagai Presiden Argentina melalui sidang kongres selama 15 jam. Naiknya Rodríguez Saa menjadi titik balik berkuasanya kaum peronis yang pada periode sebelumnya mengalami kekalahan dalam pemilihan. Setelah dilantik pada tanggal 23 Desember 2001, Saa langsung mengumumkan pada publik bahwa Argentina tidak mampu membayar hutang luar negerinya (*default*). Pada saat itu nilai hutang luar negeri Argentina menembus angka yang cukup besar, yaitu 132 miliar USD. Bagi Saa jumlah uang yang harus dibayarkan tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan rakyat Argentina.³²

Meskipun Saa menyatakan ketidakmampuan membayar hutang luar negeri, Saa berusaha menciptakan lapangan kerja, menyediakan bantuan sosial dan menyediakan uang di Bank. Saa juga memerintahkan bank-bank untuk tetap buka hingga pukul 10 malam. Sebelumnya kebijakan Saa tersebut justru diduga sebagai penyebab ketidakstabilan sosial di Argentina. Saa tetap mempertahankan

³¹ Akbar, H. (2006). *repository.upnyk.ac.id*. Dipetik April 4, 2017, dari [upnyk.ac.id: http://repository.upnyk.ac.id/8156/2/Hikmatul_Akbar_Argentina_Demokrasi.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/8156/2/Hikmatul_Akbar_Argentina_Demokrasi.pdf)

³² *Ibid.*, hlm. 11

kebijakan *pegging* peso yang memang sudah dilakukan sejak pemerintahan Carlos Menem. Hal yang mengejutkan adalah kebijakan Saa menciptakan mata uang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar akan uang. Kebijakan mata uang baru yang disebut *Argentinos* ini justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan kemudian kembali menimbulkan kerusuhan tanggal 29 Desember 2001.³³ Kejadian ini kemudian diikuti dengan mundurnya hampir seluruh anggota kabinet Saa. Akhirnya, Rodriguez Saa pun mundur dari jabatannya dan digantikan oleh ketua DPR Argentina, yaitu Eduardo Camano yang menjabat sebagai Presiden sementara.

Pemerintahan yang cukup singkat tersebut menjadi awal mula renggangnya hubungan Argentina dengan IMF. Penundaan pembayaran hutang luar negeri serta kebijakan Rodriguez Saa yang dinilai tidak mampu mereduksi defisit yang ada menyebabkan IMF tidak lagi memberi kucuran dana. Pada 5 Desember 2001, IMF secara resmi mengumumkan bahwa tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Argentina pada tahun 2002.³⁴

E. Era Eduardo Duhalde (2002-2003)

Pada awal tahun 2002 Eduardo Duhalde terpilih menjadi Presiden Argentina menggantikan Adolfo Rodriguez Saa. Terpilihnya pemimpin baru seperti tidak memberikan harapan bagi masyarakat Argentina pada masa itu. Semua pihak sadar bahwa untuk memperbaiki kondisi Argentina pada saat itu

³³ Loc.Cit

³⁴ Rogers, M. (2011, Desember 27). *The Argentina Independent*. Dipetik Januari 5, 2017, dari Argentina Independent Web Site: <http://www.argentinaindependent.com/currentaffairs/analysis/2001-2011-the-making-of-a-crisis/>

sangatlah sulit. Namun, dukungan yang luar biasa justru didapatkan Duhalde. Bahkan kongres sepakat untuk tidak mengganti Eduardo Duhalde sampai terlaksananya pemilu pada tahun 2003.

Dalam masa kepemimpinannya, Duhalde diberikan kewenangan yang cukup besar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Kebebasan tersebut diberikan dengan harapan Duhalde mampu dengan cepat memperbaiki gejala yang terjadi dalam negeri, meskipun banyak kalangan yang pesimis akan hal tersebut. Beberapa kebijakan yang diambil Duhalde antara lain; Pertama, pengangkatan menteri dari kalangan pengusaha, hal tersebut dilakukan dengan harapan para pengusaha tersebut dapat membantu perekonomian negara. Kedua, Duhalde tidak lagi meneruskan kebijakan *pegging* yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Meski tidak memberikan hasil yang cukup signifikan, Eduardo Duhalde mampu menyelesaikan tugasnya sebagai presiden hingga tahun 2003.

F. Era Nestor Kirchner (2003-2007)

Pada pemilu tahun 2003, Argentina memiliki dua kandidat untuk menduduki posisi presiden, yaitu Carlos Menem dan Nestor Kirchner. Nestor Kirchner duduk di kursi presiden lebih cepat dikarenakan Carlos Menem mengundurkan diri pada putaran kedua. Kirchner yang merupakan seorang pengacara dan politikus ini mempunyai catatan politik yang cukup baik. Ia dipuji sebagai seorang administrator yang baik dan bebas dari korupsi. Wilayah yang ditanganinya selama menjadi gubernur juga sangat makmur. Sumber kemakmuran wilayah Kirchner yaitu Santa Cruz ada pada domba dan minyak. Santa Cruz

bahkan memiliki populasi domba yang lebih banyak dari populasi manusianya.³⁵ Meski memiliki catatan yang baik dan dukungan yang cukup, tugas Nestor Kirchner dalam menangani masalah ekonomi yang baru saja mengalami *hyperinflation* tidaklah mudah.

Pada sektor politik, Kirchner membuat kebijakan dengan memaksa pejabat militer untuk pensiun serta membatalkan undang-undang yang melarang ekstradisi perwira militer yang terlibat dalam kejahatan serta pelanggaran HAM pada era kediktatoran rezim militer.³⁶ Latar belakang Nestor Kirchner yang berideologi peronis, mempengaruhi pengambilan kebijakan-kebijakan Nestor Kirchner yang lebih berpihak kepada rakyat.

Di sektor ekonomi, Nestor Kirchner membantu negosiasi untuk kesepakatan restrukturisasi hutang dengan IMF setelah gagal mendapat pinjaman sebesar 2,9 miliar USD. Nestor juga melakukan kebijakan untuk mendevaluasi peso terhadap mata uang asing untuk menjaga kestabilan nilai mata uang.³⁷ Di bawah pemerintahan Nestor Kirchner, perlahan ekonomi Argentina mulai tumbuh, meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2005 Nestor membayar hutang sebesar 10 miliar USD, meskipun sedikit, namun Nestor mampu memperlihatkan keinginan Argentina untuk lepas dari ketergantungan IMF. Puncaknya adalah pada tahun

³⁵ Akbar, H. (2006). *repository.upnyk.ac.id*. Dipetik April 4, 2017, dari [upnyk.ac.id: http://repository.upnyk.ac.id/8156/2/Hikmatul_Akbar_Argentina_Demokrasi.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/8156/2/Hikmatul_Akbar_Argentina_Demokrasi.pdf)

³⁶ Encyclopedia Britannica. (2013, Mei 2). *Encyclopedia Britannica*. Dipetik April 4, 2017, dari <https://www.britannica.com/biography/Nestor-Kirchner>

³⁷ Loc.Cit

2006 dimana Nestor Kirchner membayar hutang kepada IMF sebesar 9,5 miliar USD sekaligus memutuskan hubungan dengan IMF.³⁸

Dengan beberapa kebijakan yang cenderung populis, masa pemerintahan Nestor Kirchner mendapat dukungan yang baik dari publik, terlebih dari masyarakat yang mulai tidak percaya lagi terhadap lembaga keuangan dunia dalam hal ini IMF. Dukungan yang banyak dari masyarakat tidak membuat Nestor Kirchner berniat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum. Akhirnya pada tahun 2007 Nestor resmi selesai dari masa jabatannya sebagai Presiden.

G. Era Cristina Fernandez (2007-2015)

Cristina Fernandez yang sebelumnya menjadi Ibu Negara, kini naik menjadi Presiden Argentina meneruskan suaminya, Nestor Kirchner. Kemenangan Cristina Fernandez merupakan sejarah baru bagi Argentina, pasalnya Cristina merupakan Presiden perempuan pertama yang dipilih secara langsung. Sama seperti suaminya, Cristina adalah seorang yang berlatar belakang peronis. Naiknya Cristina Fernandez sebagai presiden tak luput dari pengaruh Nestor Kirchner yang pada periode sebelumnya mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Sebetulnya Nestor Kirchner masih mendapat kepercayaan untuk maju lagi dalam pencalonan presiden Argentina pada tahun 2007, namun Nestor menolak dan mendeklarasikan dukungannya kepada istrinya, Cristina Fernandez.

³⁸ Kompas. (2012, September 20). *IMF Ancam Argentina : Kompas*. Dipetik Januari 5, 2017, dari <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/20/02165392/IMF.Ancam.Argentina>

Cristina Fernandez masih memiliki ideologi peronis yang sudah mengakar pada dirinya. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun tidak jauh berbeda dengan cita-cita kaum peronis pada waktu itu, antara lain adalah menaikkan upah buruh, memperbaiki kondisi sosial ekonomi, memberi jaminan atas hak-hak buruh dan keberpihakannya kepada rakyat kecil dan kelas menengah.³⁹ Keberhasilan suaminya membawa Argentina lepas dari ketergantungan terhadap IMF, dilanjutkan oleh Cristina. Strategi yang dilakukan oleh Cristina Fernandez yaitu dengan menerbitkan obligasi. Dengan strategi tersebut, pada tahun 2010, Argentina mampu membayar lagi hutangnya sebesar 92,4% dari total gagal bayar hutang tahun 2001.⁴⁰ Selain pembayaran hutang, Cristina Fernandez juga memberlakukan kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan minyak terbesar Argentina, yaitu YPF pada tahun 2012.⁴¹

Kebijakan-kebijakan Cristina Fernandez pada masa pemerintahannya, memang lebih banyak berfokus kepada pembangunan dalam negeri, bahkan cenderung tertutup. Dalam pelunasan hutang misalnya, Cristina lebih memilih untuk menerbitkan obligasi yang ditujukan kepada pengusaha dalam negeri dibandingkan mengundang investor dari luar. Cristina percaya dengan kekuatan

³⁹ Aly, B. (2017, Januari 24). *Argentina Dibayangi Peronisme : Uni Sosial Demokrat*. Dipetik April 3, 2017, dari Uni Sosial Demokrat: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9123&coid=3&caid=31&gid=2

⁴⁰ Torres, M. A. (2011, Februari 16). Dipetik April 4, 2017, dari http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_26489.pdf

⁴¹ Hernandez, V. (2012, April 17). *YPF nationalisation: Is Argentina playing with fire?* : *BBC news*. Dipetik April 4, 2017, dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-europe-17740393>

ekonomi yang mulai bangkit, Argentina mampu meningkatkan daya saing dengan negara lain.

Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, Argentina terus menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup berat. Kepemimpinan junta militer yang merenggut hak asasi manusia, kekalahan perang yang banyak merugikan Argentina, kisruh politik dalam negeri, hingga krisis ekonomi yang selalu terjadi, merupakan keadaan-keadaan yang pernah menghantui negeri Amerika Latin tersebut. Setiap era kepemimpinan di Argentina, khususnya setelah lengsernya junta militer, keadaan yang diharapkan tidak sepenuhnya terwujud. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, nyatanya belum mampu menjadikan Argentina menjadi negara yang memiliki *power* di dunia internasional.

Seperti kebanyakan Negara Dunia Ketiga lainnya, satu hal yang selalu terjadi adalah keinginan untuk melakukan pembangunan dengan cepat. Bahkan sebelum pemerintahan Raul Ricardo Alfonsin Foulkes, Argentina pernah menjadi negara yang makmur dengan segala sumber dayanya. Pemerintahan yang kacau dan carut marut akhirnya mengakibatkan Argentina tidak mampu mempertahankan predikatnya sebagai negara yang makmur. Ketergantungan terhadap bantuan asing dan hutang dari lembaga dunia/IMF semakin mempersulit Argentina keluar dari krisis yang terjadi. Keinginan pembangunan yang instan nyatanya justru memperburuk keadaan negara. Formulasi yang diberikan oleh IMF terhadap Argentina nyatanya tidak seperti apa yang diharapkan dan bahkan terkesan menjebak. Semakin negara tersebut menerima pinjaman, semakin sedikit kebebasan yang didapatkan untuk membangun negerinya sendiri. Pada bab ini

terlihat jelas bahwa pada kepemimpinan Carlos Menem, Argentina menjadi 'anak emas' IMF dikarenakan semua kebijakan yang direkomendasikan dilakukan oleh Menem. Krisis terparah terjadi pada era Fernando de la Rúa dan penerusnya, Rodriguez Saa. Kebijakan yang tidak hati-hati menyebabkan gejolak dan bahkan hubungannya dengan IMF mulai renggang pada pemerintahan Rodriguez Saa. Naiknya Nestor Kirchner menjadi titik balik berkuasanya kaum peronis sehingga kebijakan-kebijakan populis yang diterapkan membawa Argentina menjadi negara yang tertutup dan hubungan dengan IMF benar-benar berakhir. Keadaan tersebut masih diteruskan setelah Cristina Fernandez naik menggantikan Nestor Kirchner.

Memang dalam kondisi tersebut, pemerintah yang sedang menjabat menghadapi dilema yang berat. Satu sisi pemerintah harus memenuhi tuntutan rakyatnya namun di sisi lain terkadang kemampuan dalam negerinya belum mendukung. Hal tersebut yang terkadang memaksa pemerintah meminjam bantuan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF. Meskipun tak dapat dipungkiri juga bahwa pasti ada motif ekonomi dan politik dalam kebijakan bantuan luar negeri tersebut.